

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1. Gambaran Umum Data Penelitian

Data penelitian ini diambil dari Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Kupang bagian Kepengurusan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) yaitu pada Bidang Ekonomi. Data yang diambil yaitu data yang berhubungan dengan dana PEM. Data diperoleh dari dokumentasi dan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ekonomi pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Kupang yang terkait dalam pengelolaan dana PEM di Kota Kupang. Data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa jumlah dana yang disalurkan pada 6 kecamatan yang ada mulai dari tahun 2013, 2015, dan 2017 yang meliputi jumlah dana yang telah dikembalikan, jumlah dana yang masih mengalami tunggakan serta rendahnya partisipasi masyarakat berkaitan dengan dana PEM yang termuat pada Laporan Penyaluran Dana PEM Tahap I sampai dengan Tahap III dan Laporan Pengguliran Dana PEM Tahap I sampai dengan Tahap X.

Data yang diperoleh yaitu mengenai total cicilan dana PEM di Kota Kupang yang masih harus dikembalikan (siswa cicilan), total jumlah penerima dana PEM di Kota Kupang, serta jenis usaha masyarakat yang meminjam dana PEM di Kota Kupang. Data dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Perkembangan Dana PEM di Kota Kupang Tahun 2013-2017

No	Tahap penyaluran	Jumlah (Rp)	Jumlah (Orang)	Tahap pengguliran	Jumlah (Rp)	Jumlah (Orang)
1	Tahap 1 (Juni 2013)	685.093.534	3.882	a. Tahap 1 (Maret 2014) b. Tahap 2 (Juni 2014) c. Tahap 3 (Sept 2014)	886.389.296 1.436.862.333 2.369.243.111	1.374 1.349 1.206
2.	Tahap 2 (Maret 2015)	2.067.691.035	1.902	a. Tahap 4 (April 2015) b. Tahap 5 (Okt 2015) c. Tahap 6 (Feb2016) d. Tahap 7 (Juli 2016) e. Tahap 8 (Des 2016) f. Tahap 9 (Mei 2017)	2.771.903.126 2.939.738.217 2.117.334.800 1.536.249.500 1.052.598.000 374.473.000	1.013 794 491 276 163 57
3	Tahap 3 (Sept 2017)	11.909.981.888	1.760	Tahap 10 (Nov 2017)	349.450.000	45
TOTAL		14.662.766.457	7.544	TOTAL	16.834.241.383	6.768

Sumber : BAPPEDA Kota Kupang, 2019

Data pada tabel 5.1 diketahui bahwa total penyaluran tahap 1 sebesar Rp. 680.093.534 untuk 3.882 orang telah menciptakan pelipatgandaan melalui perguliran tahap 1-3, sehingga jumlah pinjaman yang disalurkan meningkat menjadi Rp. 5.372.588.274 sementara itu jumlah penerima meningkat menjadi 7.811 orang. Kemudian pada total penyaluran tahap 2 sebesar Rp.

2.067.691.035 untuk 1.902 orang telah menciptakan pelipatgandaan melalui perguliran tahap 4-9, sehingga jumlah pinjaman yang disalurkan meningkat menjadi Rp. 13.859.987.678 sementara itu jumlah penerima menurun menjadi 4.696 orang. Selanjutnya pada penyaluran tahap 3 sebesar Rp. 11.909.981.888 untuk 1.760 orang telah menciptakan pelipatgandaan melalui perguliran tahap 10 sehingga jumlah pinjaman meningkat menjadi Rp. 12.259.431.888 dan jumlah penerima menurun menjadi 1.805 orang.

Tabel 5.2
Jenis Usaha Masyarakat Yang Meminjam Dana PEM

Peternakan	Warung
Kios	Konveksi
Bengkel	Cuci Motor
Salon	Menjahit
Fotocopy	Batako

Sumber : BAPPEDA Kota Kupang, 2019

Dari tabel 5.3 dapat diketahui beberapa jenis usaha yang telah digeluti masyarakat yang meminjam dana PEM guna untuk kelangsungan usaha mereka.

1.2. Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ekonomi pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Kupang Bapak Hengky C. Malelak, S.STP, M.S terkait dalam pengelolaan dana PEM di Kota Kupang., maka dapat diuraikan faktor-faktor penyebab terjadinya tunggakan dalam pengembalian dana PEM serta beberapa hal yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap dana PEM di Kota Kupang sebagai berikut:

1.2.1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tunggakan dalam Pengembalian Dana PEM

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan beberapa faktor penyebab terjadinya tunggakan dalam pengembalian dana PEM yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Kurangnya Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak LPM belum dilakukan secara maksimal karena tidak dapat menjangkau seluruh penerima dana PEM sehingga penerima masih bisa mengulur waktu dalam proses pengembalian dana. Berdasarkan pada pernyataan Bapak Hengky C. Malelak, S.STP, M.Si diketahui bahwa pihak LPM di beberapa kelurahan jarang melakukan pengawasan terkait dana yang telah diterima oleh masyarakat karena jumlah pegawai LPM yang sedikit dan masih ada pegawai yang tidak aktif dan pihak LPM yang menganggap bahwa pengawasan terkait dana PEM hanya dilakukan oleh BAPPEDA Kota Kupang. Padahal jika dilihat dalam Petunjuk Pelaksanaannya, LPM itu sendiri harus aktif melakukan pengawasan karena LPM merupakan lembaga yang terdekat dengan para penerima dana PEM sehingga diharapkan dapat mengawasi dengan lebih baik agar dana yang telah diterima dapat

digunakan sesuai dengan peruntukannya dan dapat dikembalikan tepat pada waktunya.

b. Kurangnya Kemampuan dan Ketelitian dalam Melakukan Analisis Permintaan Pinjaman

Pada saat melakukan survey terhadap usaha calon penerima tidak disertai dengan analisis lebih lanjut mengenai kelayakan permintaan pinjaman dilihat dari potensi pengembangan usaha dan potensi pengembalian pinjaman. Hal ini penting untuk dilakukan agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian pinjaman dan menghindari kolusi dalam pemberian dana PEM karena berdasarkan pernyataan Bapak Hengky C. Malelak, S.STP, M.Si bahwa pihak LPM hanya memastikan keberadaan usaha saja padahal sebenarnya salah satu syarat untuk meminjam dana PEM adalah masyarakat yang meminjam dana PEM tersebut adalah masyarakat yang telah/sudah menjalankan usahanya lebih dari 3 tahun agar dalam pengembaliannya lebih mudah karena telah memiliki penghasilan sendiri.

c. Kurangnya Komunikasi antara LPM dan Penerima Dana PEM

Dalam hal ini, LPM kurang memberikan motivasi dan arahan agar penerima dana PEM dapat mengelola dana PEM dengan baik sesuai dengan peruntukannya dan dapat mengembangkan usaha yang dimilikinya. Masyarakat pun masih menganggap dana PEM sebagai hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kota Kupang

sehingga tidak diwajibkan untuk mengembalikannya. Hal ini didasarkan oleh pernyataan Bapak Hengky C. Malelak, S.STP, M.Si bahwa masyarakat mungkin menganggap dana PEM merupakan bantuan dari Pemerintah Kota Kupang sehingga mereka sering bersikap acuh tak acuh dalam mengembalikan dana tersebut. Stigma yang dibangun oleh sebagian penerima ini masih menjadi kendala oleh LPM dan masih diperlukan komunikasi yang baik dengan penerima untuk mengubah pemahaman mereka.

2. Faktor Eksternal

1) Kondisi Ekonomi Penerima Dana yang Tidak Menentu

Sebagian masyarakat penerima dana PEM mempunyai kondisi ekonomi yang lemah sehingga penerima masih harus memperhatikan ekonomi rumah tangganya terlebih dahulu sebelum mengembalikan cicilan dana PEM. Dengan kata lain adanya kesenjangan sosial dimana penerima lebih memilih untuk menggunakan uangnya untuk memperbaiki kondisi ekonominya dibandingkan memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana PEM yang telah diterima.

2) Kurangnya Pengembangan Usaha Masyarakat

Penerima dana PEM cenderung membelanjakan dana yang didapat untuk menambah jumlah produk usaha tanpa memperkirakan

keuntungan dan persaingan yang ada. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pelatihan tentang berwirausaha.

3) Pengembalian Dana Tidak Sesuai dengan Perjanjian

Pengembalian dana yang dilakukan oleh penerima dana PEM terkadang tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dan tepat pada waktu yang ditentukan. Menurut pernyataan Bapak Hengky C. Malelak, S.STP, M.Si bahwa penerima biasanya membayar lebih rendah dari perjanjian dan menunda-nunda dalam proses pengembalian dana. Hal tersebut dikarenakan para penerima masih harus memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu.

5..2.2. Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Partisipasi Masyarakat Berkaitan dengan Dana PEM

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan beberapa faktor penyebab semakin rendahnya partisipasi masyarakat berkaitan dengan dana PEM sebagai berikut :

1. Kurangnya Sosialisasi

Menurut pernyataan Kepala Bidang Ekonomi pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Kupang Bapak Hengky C. Malelak, S.STP, M.Si, pihak LPM di setiap kelurahan mungkin kurang memberikan informasi yang memadai kepada seluruh masyarakat berkaitan dengan dana PEM tersebut sehingga menyebabkan hanya sebagian masyarakat saja yang

berminat dan turut berpartisipasi terhadap program pemerintah yaitu dana PEM.

2. Tidak Tepat Sasaran

Menurut pernyataan Kepala Bidang Ekonomi pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Kupang Bapak Hengky C. Malelak, S.STP, M.Si Tidak tepat sasaran disini dimaksud bahwa :

- a) Pihak LPM seringkali lebih mengutamakan anggota keluarga mereka yang ingin meminjam dana PEM tersebut dibandingkan masyarakat yang lain.
- b) Pihak LPM seharusnya mampu dan lebih teliti dalam menganalisis permintaan pinjaman, sehingga dana PEM tersebut diberikan terutama kepada masyarakat yang mempunyai usaha perorangan berskala kecil yang telah berjalan agar usaha masyarakat tersebut dapat lebih berkembang lagi.